

## Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Medan tentang Calon Gubernur Berlatarbelakang TNI Pada Pilkada 2018

Wendri \*)

Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Kota Medan, Indonesia  
Koresponden: [Wendrimedan1@gmail.com](mailto:Wendrimedan1@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Medan Tentang Calon Gubernur Berlatar Belakang TNI Pada Pilkada Tahun 2018” adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data salah satunya dilakukan dengan cara wawancara dengan 25 tokoh masyarakat kota. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi tokoh masyarakat Kota Medan terhadap kepemimpinan berlatarbelakang TNI memiliki penampilan fisik dan berkomunikasi secara tegas gubernur dianggap dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan serta terjaminnya ketersediaan bahan pangan, sedangkan kepemimpinan gubernur berlatar belakang sipil dianggap kurang mampu menjawab keinginan masyarakat, keamanan, nyaman dan ketersediaan bahan pangan. Selain itu mudah terjerat praktek korupsi sebagaimana pada kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara H. Syamsul Arifin dan Gatot Pudjonugroho, sehingga masyarakat Kota Medan tidak ragu untuk memilih calon gubernur berlatarbelakang TNI pada Pilkada 2018.

**Kata Kunci:** TNI, Persepsi, Gubernur Sumatera Utara

### ABSTRACT

*The study, entitled "Medan City Community Leaders Perceptions About Candidates for Governor with TNI Background in the 2018 Regional Election" is a type of research with a qualitative-descriptive approach. One of the data collection techniques was carried out by interviewing 25 urban community leaders. Based on the results of the study it can be concluded that the perception of Medan City community leaders towards leadership with a background of the TNI has a physical appearance and communicates firmly the governor is considered to be able to create security and comfort and guaranteed availability of food, while the leadership of the governor with a civil background is considered less able to answer the wishes of the community, security, comfort and availability of food. In addition, it is easy to get entangled in corrupt practices as in the leadership of North Sumatra Governor H. Syamsul Arifin and Gatot Pudjonugroho, so that the people of Medan do not hesitate to choose candidates for governor with a TNI background in the 2018 elections.*

**Keywords:** TNI, Perception, Governor of North Sumatra

### Pendahuluan

Selama pemerintahan Orde Baru, TNI dan Polri yang menyatu dalam ABRI. Pada saat itu terjadi dominasi militer pada hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Militer juga difungsikan sebagai pilar penyangga kekuasaan. Konsep ini muncul sebagai dampak dari implementasi konsep dwifungsi ABRI yang telah menjelma menjadi multifungsi. Akibatnya peran ABRI dalam kehidupan bangsa telah melampaui batas-batas konvensional keberadaannya sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan. Integrasi status Polri yang berwatak sipil ke dalam tubuh ABRI dapat dikatakan sebagai pengingkaran terhadap prinsip demokrasi. P

Penguatan ABRI sebagai kekuatan sosial politik baru terjadi secara legal formal setelah keluarnya UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Lahirnya UU ini untuk lebih memantapkan landasan hukum dwifungsi ABRI, yang sebelumnya hanya diatur dalam Ketetapan MPR. Dalam UU No. 20 Tahun 1982 ditegaskan bahwa pengaturan

peran sosial politik ABRI adalah sebagai kekuatan sosial yang bertindak selaku dinamisator dan stabilisator.

Jatuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto telah melahirkan satu perubahan besar dalam sistem perpolitikan Indonesia secara umum. Secara khusus, dalam perspektif hubungan sipil-militer, telah terjadi titik balik yang ditandai dengan kritik-kritik tajam terhadap militer sepanjang Soeharto berkuasa. Tuntutan terhadap reformasi peran militer pun muncul dari berbagai komponen masyarakat, termasuk dari kalangan militer sendiri. Penghapusan dwifungsi ABRI juga menjadi salah satu pilar reformasi yang diajukan komponen gerakan reformasi, terutama kalangan mahasiswa. Pada awal masa reformasi itu, ABRI dikecam dan dicaci oleh rakyat, terutama mahasiswa, karena perannya sebagai alat kekuasaan yang otokratis pada masa Orde Baru. ABRI dianggap paling bersalah terhadap krisis yang dihadapi bangsa Indonesia.

Berdasarkan interpretasi reformasi tersebut, maka agenda nasional harus difokuskan pada upaya pengembangan yang terus menerus terhadap 'indeks demokrasi'. Indeks itu dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek kehidupan berbangsa dan bernegara: Pertama, keberadaan sistem pemilihan umum yang bebas dan adil; kedua, keberadaan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif; ketiga, pemajuan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik seluruh warga tanpa kecuali; dan keempat, keberadaan masyarakat yang memiliki rasa percaya diri yang penuh. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), merupakan agenda penting bagi setiap elemen masyarakat, karena pesta demokrasi bagi penerus pimpinan daerahnya akan ditentukan pada momentum tersebut. Khususnya institusi partai politik harus selektif dalam memilih calon perwakilan yang akan diusungnya untuk maju ke Pemilukada. Komunitas atau organisasi masyarakat akan terlihat pada kampanye-kampanye sebagai anggota relawan untuk mengusung calon yang diinginkan. Setidaknya hingga 12 Januari 2017, terdapat 569 pasangan calon yang sudah terdaftar dengan status diterima dalam laman situs Pilkada 2018. Empat pasangan ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebanyak 1.138 orang calon itu, 16 orang di antaranya dari unsur TNI/Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah berstatus purnawirawan. Lokadata Beritagar.id mengolah data calon kepala daerah yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2018, terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Untuk pemilihan gubernur di 17 provinsi, dari 57 pasangan calon sebagian besar berlatar belakang eksekutif dan legislatif. Calon gubernur dari kalangan eksekutif sebanyak 29 orang, atau satu dari dua calon gubernur yang mendaftar. Sedangkan wakilnya yang berasal dari kalangan eksekutif mencapai 32 persen, atau 18 orang. Kalangan eksekutif dimaksud adalah calon yang statusnya petahana, sedangkan legislatif bisa anggota DPR, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk calon gubernur dari kalangan swasta, jumlahnya mencapai 30,4 persen atau 17 orang, sedangkan calon wakil gubernur dari kalangan ini, berjumlah 18 orang.

Pada tahun 27 Juni 2018 diadakan Pemilukada serentak di Indonesia. Terdapat 171 daerah yang mengikuti pesta demokrasi antara lain 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Provinsi tersebut antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Maluku Utara (Prasetya, 2017:98). Pemilihan kepala negara ataupun kepala daerah diikuti oleh kandidat dari berbagai macam partai pengusung dan dari berbagai latar belakang kandidat yang beragam. Mulai dari latar belakang pegawai negeri sipil (PNS), TNI-Polri, partai politik, pengusaha, dan lain-lain. Pilkada 2018 memang berbeda. Belum pencalonan, sudah ada setidaknya lima Jenderal aktif yang menjadi nonaktif. Mereka mengajukan pensiun dini, meski kariernya masih mulus, dan memiliki waktu dua tahun menjelang pensiun. Ada pula pemegang komando tertinggi pasukan elit Polri, yang juga memiliki kecemerlangan karier yang sama (Witjaksono, 2018). Calon dari berlatar belakang TNI yakni 1. Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN untuk maju di Pilkada Sumatera Utara; 2. Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin maju di Pemilukada Kaltim 2018 lewat gerbong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 3. Mayor Jenderal (Purn)

Sudrajat yang diusung Partai Gerindra dan PKS, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan di kabarkan akan diusung oleh PDIP untuk memenangkan suara di Jawa Barat; 4. Inspektur Jenderal Murad Ismail diusung oleh Partai Nasdem dan PDIP untuk maju di Pilkada Maluku 2018; 5. Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw maju dalam pemilihan calon Gubernur Papua diusung oleh Partai Golongan Karya (Chairunnisa, 2017:67). Kesempatan yang sama untuk calon kepala daerah dari latar belakang yang berbeda terbuka lebar. Menjadikan iklim politik nasional menjadi isu yang “panas” sebagai bahan perbincangan di semua kalangan, terutama di media massa cetak maupun elektronik.

Melihat sejarah kepemimpinan dari orang berlatarbelakang TNI dalam memimpin negara atau daerah menandakan ada prestasi baik dan buruk. Namun, pendapat atau persepsi dari masyarakat justru berbeda-beda. Masyarakat yang heterogen, maka akan bervariasi pula persepsi yang timbul, sedangkan persepsi sendiri tidak tampak mata karena berupa pemikiran individual dan tersimpan pada memori masing-masing. Ada beberapa alasan yang bisa digunakan militer untuk dapat kembali masuk ke ranah politik, diantaranya adalah karena militer menilai sipil telah gagal mengatasi negara. Ada persepsi dari militer bahwa sipil gagal. Kemudian juga sipil telah dinilai menabrak konstitusi. Kalau dua faktor ini ada, ada alasan militer masuk ke ranah politik praktis. Faktor lain yang tidak kalah penting, yakni militer akan masuk ke politik kalau sipil sudah mengganggu atau mengintervensi TNI.

Penelitian ini mengangkat dua tipe persepsi negatif atau positif. Persepsi dari berbagai orang dalam menginterpretasikan pesan yang diterimanya berbeda-beda sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Begitu juga masyarakat di Indonesia dalam mempersepsikan sebuah fenomena atau isu yang sedang tren, khususnya di kota Medan. Kota Medan merupakan ibukota dari Sumatera Utara yang termasuk sorotan rubrik nasional karena kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan memiliki masyarakat yang sangat heterogen dari suku seperti Batak dan Melayu Deli merupakan suku asli, sedangkan pendatang seperti Minang, Aceh, Jawa, Papua, Tionghoa, India, dan lain sebagainya tumbuh dan bersosialisasi. Dengan demikian, Kota Medan dikenal sebagai miniatur Indonesia. Untuk itu sebagai rumusan permasalahannya adalah bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kota Medan tentang calon gubernur dari TNI pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018? Tentu politik dan persepsi tidak terlepas dari komunikasi. Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol (Nimmo Dan, 2005: 6).

Komunikasi digambarkan oleh Lasswell sebagai “Who says what to whom in what channel with what effect” yang berarti siapa mengatakan apa pada siapa menggunakan saluran apa dengan efek apa (Nimmo, 2005:10). Singkatnya, suatu pengertian, suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni personal yang dibagi dengan orang lain; atau pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan simbol (Nimmo Dan, 2005:6)

Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Semua pandangan yang beragam ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan (Nimmo Dan, 2005: 8). Pada umumnya dapat dikatakan politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan yang dipilih. Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem politik itu sendiri. Dalam melaksanakan kebijaksanaan itu diperlukan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang dipakai untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.

### **Komunikasi Politik**

Komunikasi politik sebagai proses dengan mana pemimpin, media, dan warganegara suatu bangsa bertukar dan menyerap makna pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Komunikasi politik memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik: komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik (Michael Rush dan Phillip Althoff, 2008: 24). Komunikasi politik adalah proses dimana kepemimpinan nasional, media dan masyarakat saling bertukar dan memberi makna terhadap pesan-pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Beberapa unsur yang terkandung dalam definisi tersebut; pertama, komunikasi politik sebagai suatu proses. Komunikasi politik tidak dapat terjadi secara otomatis begitu saja, di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan kompleks dan dinamis. Selain itu, proses tersebut juga mengandung adanya tarik menarik pengaruh. Pemerintah mempengaruhi media dengan menawarkan bahan untuk pemberitaan, sementara media mendesak para politisi melalui serangkaian mekanisme institusional sebagai deadline dan nilai berita.

### **Gaya Komunikasi Politik**

Gaya komunikasi politik adalah seperangkat perilaku politik antar pribadi yang terspesialisasi dan digunakan dalam suatu situasi politik tertentu sumber pesan media penerima baik berupa verbal maupun non verbal (Afib, 2011:47-49). Komunikasi verbal adalah sebagai berikut: a. Vocabulary (perbendaharaan kata-kata). Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, karena itu olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. b. *Racing* (kecepatan). Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. c. Intonasi suara: akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proposional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. d. Humor. Merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi untuk memecah kekakuan dalam berkomunikasi e. Singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. f. Timing (waktu yang tepat) adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan, sedangkan komunikasi nonverbal mencakup aspek-aspek berupa: a. Komunikasi objek. Yang paling umum adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini dianggap termasuk salah satu bentuk stereotipe. b. Sentuhan. Sentuhan dapat termasuk: bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif ataupun negatif. c. Kronemik. Kronemik adalah penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu. d. Bahasa Tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase. e. Proxemik atau bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban Anda dengan orang lain, menunjukkan seberapa besar penghargaan, suka atau tidak suka dan perhatian Anda terhadap orang lain, selain

itu juga menunjukkan simbol sosial. f. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara.

### **Komunikasi Politik Kepala Daerah**

Banyaknya kerusuhan menandakan belum terjalin komunikasi efektifnya komunikasi politik yang dilakukan oleh kepala daerah serta jajaran pegawainya kepada masyarakat. Devito dalam (Budianto dan Hamid, 2011: 317-324), menyebutkan komunikasi yang efektif ditandai dengan keterbukaan, empati, perilaku suportif, perilaku positif, perilaku positif, dan kesamaan. Penjelasan mengenai komunikasi efektif adalah sebagai berikut: 1. Sifat keterbukaan menunjukkan seorang calon kepala daerah atau kepala daerah membuka diri pada masalah yang berkaitan dengan publik sehingga publik mengetahui gagasan, pendapat, pikiran kepala daerah. 2. Empati merupakan kemampuan seorang calon kepala daerah atau kepala daerah untuk menempatkan dirinya pada peranan atau posisi orang lain. 3. Perilaku suportif adalah seorang calon kepala daerah atau kepala daerah dalam menghadapi suatu masalah tidak bersikap defensif. 4. Perilaku positif adalah seorang calon kepala daerah atau kepala daerah harus memiliki pandangan positif terhadap dirinya dan mempunyai perasaan positif terhadap orang lain dalam berbagai situasi komunikasi. 5. Kesamaan adalah seorang calon kepala daerah atau kepala daerah merasa setara dengan rakyat yang dipimpinnya. Dia tidak boleh menganggap bahwa derajatnya lebih tinggi dari pada orang lain. (Budianto dan Hamid, 2011: 317-324).

### **Persepsi**

Persepsi (dari bahasa Latin *perceptio*, *percipio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindera, seperti penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian.

Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran. Sejak ditemukannya psikologi eksperimen pada abad ke-19, pemahaman psikologi terhadap persepsi telah berkembang melalui penggabungan berbagai teknik. Dalam bidang psikofisika telah dijelaskan secara kuantitatif hubungan antara sifat-sifat fisika dari suatu rangsangan dan persepsi. Atkinson et.al mengungkapkan bahwa persepsi berupa proses penggabungan stimulus sederhana (sensasi) yang diterima oleh panca indera manusia sehingga stimulus-stimulus tersebut memberikan makna tertentu bagi manusia. Zimbardo mengemukakan bahwa persepsi memberikan suatu makna terhadap hal-hal dan persepsi membuat suatu arahan dalam perilaku orang. Tanpa proses organisasi pada persepsi, kita tidak akan melihat objek, ruang, kejadian-kejadian, gerakan, orang, atau hubungan-hubungan, dan akan mengarahkan kita pada suatu dunia yang tidak bermakna, sensasi-sensasi yang acak (Satria dan Elhaq, 2011: 98).

Menurut Stenberg, persepsi merupakan proses waktu bagi individu untuk mengenal, mengorganisasikan, dan memaknai sensasi yang diperolehnya dari stimulus lingkungan, sehingga stimulus tersebut bermakna atau tidak bagi individu (Astuti, 2005). Jalaluddin Rakhmat (2011: 50) mengilustrasikan mengenai persepsi yakni; Coba anda letakkan sebuah buku dalam keadaan terbuka kira-kira 50 cm di muka anda. Anda melihat huruf-huruf yang kabur. Dekatkan buku ini pada mata anda perlahan-lahan. Sekarang huruf-hurufnya tampak jelas. Hal tersebut dinamakan dengan sensasi. Dalam menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori (Rakhmat, 2011: 50). Senada dengan hal tersebut, persepsi adalah proses memberi makna setelah sensasi sehingga diperoleh pengetahuan yang baru.

Robert G. King dalam Yuniati (2002: 83) mengungkapkan ada lima (5) tahapan dalam proses pembentukan persepsi adalah sebagai berikut: a. Gathering; Proses penerimaan stimulus eksternal yang terhubung pada sistem saraf tubuh individu. b. Selecting; Proses mengumpulkan



informasi sebanyak mungkin yang dapat diproses. c. *Mixing*; Proses pencampuran antara ide-ide dan pengetahuan yang kita miliki. d. *Organizing*; Proses mengorganisasikan tahap sebelumnya, lalu menyempurnakan atau mengubah kreasi sesuai dengan penerimaan dari realita. e. *Interpreting*; Merupakan langkah terakhir dari proses persepsi. Individu mencoba untuk menafsirkan suatu makna dari informasi yang diterima lalu menciptakan kesimpulan (Yuniati, 2002: 84).

Alur persepsi ada setelah terjadi sensasi yang ditangkap panca indra, menjadilah sebuah pendapat terpendam seseorang sebelum proses penyimpanan informasi dan berpikir. Demikian juga yang terjadi pada persepsi tokoh masyarakat Kota Medan tentang calon gubernur Sumatera Utara berlatar belakang TNI pada Pemilu tahun 2018, maka akan mempengaruhi bagaimana mereka akan bersikap ataupun bertindak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi, sebagai berikut (Jalaludin Rakhmat, 2011: 54), yaitu : a. Faktor-faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Krech dan Crutchfield (Jalaludin Rakhmat, 2011: 55) merumuskan dalil persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa obyek-obyek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. b. Faktor-faktor struktural faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Beberapa gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI yakni 1). Raja Djundjungan Lubis pernah menjabat sebagai Kepala Staf Sipil Daerah Militer Tapanuli tahun 1945, 2). Ulung Sitepu ataupun Brigjend. Ulung Sitepu merupakan seorang tokoh militer, pejuang, dan Gubernur Sumatera Utara ke-8; 3). Mayor Jenderal TNI (Purn) Marah Halim Harahap; 4). Mayjen TNI (Purn) Edward Waldemar Pahala Tambunan penggagas salam Sumatera Utara seperti "Horas", "Majua-jua", "Penjua-jua", "Ahoi"; 5). Letnan Jenderal TNI (Purn.) Kaharuddin Nasution; 6). Letnan Jenderal TNI (Purn.) Raja Inal; 7). Mayor Jenderal TNI (Purn) Haji Tengku Rizal Nurdin sebagai gubernur ke-14 dan pernah menjadi Pangdam I/Bukit Barisan tahun 1997 serta 7) Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi yang terpilih pada Pemilu tahun 2018.

Tampilnya Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI pada 2004, melalui pemilihan umum secara langsung, sekaligus sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia, sedikit mengubah posisi TNI. SBY tidak serta merta mengembalikan TNI ke panggung kekuasaan. Namun di era SBY keinginan TNI untuk kembali berkuasa, semakin terdengar. Semakin lama makin nyaring. Mereka yang memperdengarkan suara itu antara lain melalui mantan Panglima TNI Wiranto, eks Panglima Kostrad Prabowo Subianto dan bekas Gubernur DKI Jaya Sutiyoso. Ketiga jenderal purnawirawan di atas, masing-masing memimpin partai dan ketiga partai mereka Hati Nurani Rakyat atau Hanura (Wiranto), Gerakan Indonesia Raya/Gerindra (Prabowo) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI (Sutiyoso) akan ikut dalam Pemilu 2014. Suara ketiga bekas jenderal ini tentu saja patut didengar. Celah inilah yang membuat TNI secara institusional tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada anggotanya yang berniat untuk ikut bertarung dalam pemilihan umum.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif fenomenologi dengan fokus kajian mengenai persepsi tokoh masyarakat Kota Medan tentang calon gubernur Sumatera Utara berlatar belakang TNI pada Pemilu tahun 2018. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencangkup deskripsi dalam konteks yang detail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Peneliti menggunakan analisis tematik mengidentifikasi tema-tema yang terpola dalam suatu fenomena. Tema-tema ini dapat diidentifikasi, dikodekan secara induktif dari data kualitatif mentah (transkrip wawancara, biografi, rekaman suara, video, dan sebagainya) maupun secara deduktif berdasarkan teori.

Adapun narasumber penelitian dalam tulisan adalah tokoh-tokoh masyarakat Kota Medan : 1. tokoh perempuan 2. mantan walikota Medan 3. tokoh agama 4. tokoh politik 5. pengamat politik 6. Pengamat sosial dan budaya 7. Tokoh kepemudaan 8. Aktivis muda Islam 9. akademisi, aktivis perempuan, pengusaha, aktivis 1998 serta anggota DPRD.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara dari tokoh masyarakat di Kota Medan khususnya tokoh dari kalangan Muslim seperti Prof. Hj. Lusiana Adriani Lubis, MA.,Ph.D , Drs Shohibul Anshor Siregar, M.Si, H. Zulham Efendi Siregar, ST, Prof. Dr. Faisar Ananda, Ade Sandrawati Purba, SH., MH, Erwinsyah Hasibuan, M.Si, Drs. H. Abdillah, SE, Ak., MBA, Ir. H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si. mengatakan gaya komunikasi politik calon gubernur Sumatera Utara berlatarbelakang dari TNI pada Pemilu tahun 2018 menggunakan komunikasi politik secara verbal dan nonverbal.

Selanjutnya, Letnan Jenderal (Purn) T. Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumatera Utara bukan sosok yang asing bagi warga Sumatera Utara karena beliau pernah sekolah di SMA Negeri 1 Medan, pernah menjabat Panglima Kodam I/Bukit Baris dan keluarga beliau juga berdomisili di kota Medan. Edy Rahmayadi dipersepsikan rela menanggalkan pangkat dan jabatannya serta kembali untuk daerahnya, hanya karena prihatin dengan kondisi Sumut yang martabatnya mulai tergerus.

Edy juga mudah bergaul sehingga disenangi teman-teman di sekolahnya. Pencitraan baik TNI sejak masa orde baru dan era reformasi serta kerinduan masyarakat terhadap sosok yang tegas dan berwibawa membuat Letnan Jenderal (Purn) T. Edy Rahmayadi dinilai layak dipilih masyarakat Sumatera Utara sebagai prajurit TNI yang mempunyai pengalaman memimpin di kesatuannya, sehingga gaya komunikasi yang tegas, otoriter dan satu komando saat ini dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara.

Kepemimpinan berlatar belakang TNI bermula pada orde baru di bawah kepemimpinan Presiden RI H.Soeharto menciptakan stabilitas nasional, ketersediaan bahan pokok dan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan walaupun kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan aktivitas politik di batasi. Kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang TNI yaitu Mayor Jenderal TNI (Purn) H.T Rizal Nurdin walaupun tidak terlalu baik tapi beliau mampu mengendalikan stabilitas keamanan Provinsi Sumatera Utara pada awal reformasi memasuki fase transisi orde baru ke era reformasi dan mengalami krisis moneter yang berkepanjangan. Mayor Jenderal TNI (Purn) H.T. Rizal Nurdin jembatan orde baru ke era reformasi.

Komunikasi politik secara verbal dan nonverbal dari calon gubernur Sumatera Utara pada Pemilu tahun 2018 dipersepsikan oleh para tokoh sebagai modal untuk menjalin komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh kepala daerah kepada jajaran pegawainya dan masyarakat. Komunikasi yang efektif ditandai dengan keterbukaan, empati, perilaku suportif, perilaku positif serta kesamaan. Namun dipersepsikan bahwa calon kepala daerah dari berlatarbelakang TNI memiliki derajat yang harus lebih tinggi dari yang lain. Hal ini memiliki dampak positif dalam memimpin dan mengelola daerah yang beragam etnis, suku dan agama, tetapi bukan tidak mungkin memiliki efek negatif pada era otonomi daerah.

Selanjutnya, komunikasi verbal dan nonverbal calon gubernur dari TNI dipersepsikan sebagai memiliki gaya kepemimpinan yang memerlukan kecepatan (*ricing*). Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. c. Intonasi suara yang mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan politik akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proposional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. D. Humor. Merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi untuk memecah kekakuan dalam berkomunikasi dari seorang pemimpin e. Singkat dan jelas. Komunikasi calon gubernur yang efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. f. *Timing* (waktu yang tepat) adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan

berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan, sedangkan komunikasi nonverbal mencakup aspek-aspek yakni komunikasi objek. Paling umum adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini dianggap termasuk salah satu bentuk stereotipe.

Selanjutnya, aspek sentuhan. Sentuhan dapat termasuk: bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif ataupun negatif. Kronemik. Kronemik adalah penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu. d. Bahasa Tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase. Selain itu, aspek proxemik atau bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada yang memilih jarak yang dekat dengan siapapun dan sungkan untuk berkompromi melakukan praktik yang berbau korupsi seperti lobi-lobi politik yang dilakukan oleh calon gubernur Sumatera Utara terdahulu yang berlatarbelakang dari sipil yang pernah memimpin di Sumatera Utara.

### **Kesimpulan**

Sebagaimana telah dijelaskan dan dipaparkan hasil penelitian dan pengolahan data tentang persepsi tokoh masyarakat Kota Medan tentang calon gubernur berlatar belakang TNI pada Pemilu 2018, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi tokoh masyarakat Kota Medan terhadap kepemimpinan berlatar belakang TNI memiliki penampilan fisik dan berkomunikasi secara tegas gubernur dianggap dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan serta terjaminnya ketersediaan bahan pangan, sedangkan kepemimpinan gubernur berlatar belakang sipil dianggap kurang mampu menjawab keinginan masyarakat, keamanan, nyaman dan ketersediaan bahan pangan. Selain itu mudah terjerat praktek korupsi sebagaimana pada kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara H. Syamsul Arifin dan Gatot Pudjonugroho, sehingga masyarakat Kota Medan tidak ragu untuk memilih calon gubernur berlatar belakang TNI pada Pilkada 2018.

### **Daftar Pustaka**

- Afib, Rizal, (2011). *Gaya Komunikasi Politik Pimpinan Dprd Provinsi Jawa Tengah Pada Saat Reses Tahun 2010*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro
- Astuti, B. (2005). *Kematangan Emosi Anak Kelas 6 Sekolah Dasar Ditinjau dari Persepsi Kedemokratisan Pola Asuh Ayah dan Ibu*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Azhari, Aidul Fitriadi. (2003). *Dari Catatan Wiranto Jendral Purnawirwan: Bersaksi di Tengah Badai*. Jakarta: IDe Indonesia.
- Azwar, Rully Chairul. (2009). *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era*. Jakarta: Grasindo.
- Bungin, Burhan, (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Prenada Media.
- Chrisnandi, Yuddy. (2005). *Reformasi TNI: Persektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.



- Emzir (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Elhaq, Imam Habibi dan Satria, Arif. (2011). *Persepsi Pesanggem Mengenai Hutan Mangrove Dan Partisipasi Pesanggem Dalam Pengelolaan Tambak Mangrove Ramah Lingkungan Model Empang Parit*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia 5 (1).
- Hamid, Farid dan Budianto, Heri. (2011). *Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Kencana.
- Jalaluddin, Rakhmat. (2011). *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Kontras. (2008). *Satu Dekade: Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008)*. Jakarta: Kontras.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Bedil dan Kursi, Dimensi Politik Militer di Indonesia*, Jakarta: Kontras.
- Moleong, Lexy J, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nimmo, Dan. (2005). *Komunikasi Politik*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Pelangi Aksara : Yogyakarta
- Qadaruddin, Muhammad. (2016). *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Yuddy Chrisnandi. (2005). *Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Yuniati, Yenni. (2002). *Pengaruh Berita di Surat Kabar Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Politik*. Jurnal Mediator Vol. 3 (1).
- Sumber lain:
- <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/08/06070091/drama-danjenderal-aktif-tni-ad-dan-polri-di-pilkada-2018>
- <https://news.okezone.com/read/2018/01/09/337/1842304/menakarpeluang-calon-dari-militer-di-pilkada-serentak-2018>.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_tokoh\\_Sumatera\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_tokoh_Sumatera_Utara).
- <https://tirto.id/m/edy-rahmayadi-Dc>.
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/26/21255471/ini-catatanuntuk-kpu-ri-agar-pilkada-serentak-2018-sukses>.
- <http://politik.rmol.co/read/2017/12/26/319804/H-30-Pemilu>

<https://sefasdesak.wordpress.com/2011/05/10/perbandingan-partisipasipolitik-zaman-orde-baru-dengan-era-reformasi>

<https://fokus.tempo.co/read/1045219/pilkada-2018-lima-jenderal-siapmaju-jadi-calon-Gubernur>

[https://news.detik.com/berita/d3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018.](https://news.detik.com/berita/d3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018)